

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Agie Ahadian Rahmansyah¹; Silviana²

Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Widyatama^{1,2}

Email : agie.rahmansyah@widyatama.ac.id; silviana.msi@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif untuk menguji hipotesis berdasarkan data empiris dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 84 orang dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, sistem pengendalian intern pemerintah terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran; SPIP; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to assess the extent to which budget goal clarity and the government's internal control system influence the performance accountability of government institutions within the Cimahi City Government. A descriptive-verificative approach was employed to test the hypotheses using empirical data, analyzed through multiple linear regression with SPSS version 25. The research applied a quantitative method, utilizing questionnaires and literature review for data collection. A total of 84 respondents from 30 Regional Government Organizations (OPDs) participated in this study. The results indicate that budget goal clarity does not have a positive and significant impact on improving performance accountability. In contrast, the internal control system was found to have a positive and significant effect on enhancing the accountability of government agency performance.

Keywords : Budget Goal Clarity; SPIP; Performance Accountability of Government Agencies

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik bertujuan untuk membentuk organisasi sektor publik yang mengedepankan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Dalam konteks organisasi pemerintahan,

akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban untuk menyediakan informasi dan mengungkapkan seluruh kegiatan serta kinerja keuangan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan. (Mardiasmo, 2018)

Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab hanya dapat memperoleh dukungan publik apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi pemerintahan, proses perencanaan yang dilakukan, serta implementasi kebijakan publik yang dijalankan secara konsisten (Riyani & Widajantie, 2022). Prinsip akuntabilitas dalam sektor publik menuntut agar seluruh tindakan dan aktivitas yang dijalankan oleh organisasi pemerintah pusat dan daerah, melalui unit-unit sektor publik yang berada dalam lingkup kewenangannya. wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas informasi dan hasil kinerja pemerintah (Silviana et al., 2024). Tata kelola pemerintahan yang akuntabel menuntut setiap pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Setiap pelaksanaan tugas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi proses maupun hasil, sehingga tercipta transparansi, kejelasan peran, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023)

Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban melalui berbagai regulasi. Salah satunya melalui PP No. 8 Tahun 2006 (2006) mengenai pelaporan keuangan dan kinerja, dalam peraturan tersebut disebutkan: “Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Lebih lanjut, diterbitkan Peraturan Presiden yang mempertegas bahwa “Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pencapaian kerjanya secara terukur dan sistematis kepada para pemangku kepentingan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).” (Pemerintah Indonesia, 2014)

Penerapan SAKIP telah dievaluasi secara berkala oleh Kementerian PAN-RB melalui hasil penilaian kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pemerintah Kota Cimahi selama enam tahun berturut-turut (2017–2024), nilai SAKIP yang diperoleh berada pada predikat B (Tabel 1). Berdasarkan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, disebutkan bahwa peringkat nilai SAKIP yang paling tinggi adalah AA

dengan nilai $> 90 - 100$, sehingga masih dimungkinkan adanya ruang untuk perbaikan. Hasil evaluasi SAKIP dengan predikat B yang tidak berubah selama 8 tahun berturut – turut menunjukkan bahwa penilaian SAKIP belum berjalan secara optimal. (KemenPAN-RB, 2021)

Kejelasan sasaran anggaran dapat diduga menjadi faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran awalnya dikembangkan oleh temuan dari penelitian Kenis (1979) dimana *budget goal clarity* dan *budgetary participation* mempunyai keterkaitan yang positif terhadap peningkatan kinerja anggaran, sedangkan penelitian A. Locke, Latham (1990) menjelaskan bahwa tujuan yang jelas, termasuk dalam hal sasaran anggaran, termasuk dalam lima unsur utama yang berperan penting dalam mendorong peningkatan motivasi dan kinerja baik pada tataran personal maupun institusi. Kenis (1979), menerangkan bahwa “Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan dirumuskan secara spesifik dan jelas, sehingga memudahkan pemahaman pihak yang bertanggung jawab. Sasaran yang jelas akan membantu merumuskan target anggaran yang tepat.”

Capaian realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada periode tahun 2017–2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan rata-rata capaian realisasi belanja sebesar 86,49% dari total pagu anggaran. Capaian realisasi tersebut belum sesuai dengan target minimal serapan APBD yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu sebesar 90%. (Diskominfotik Provinsi Lampung, 2022)

Penelitian sebelumnya oleh Rahman & Yusuf (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Nuryaman et al., (2020), Le & Nguyen, (2020), Maji et al., (2016), Mardiana & Setiyowati (2021), dan Mulya & Fauzihardani (2022). Berbeda dengan Herawaty (2011), Padmadiani et al., (2023), Audia & Mulyani (2023), Putri & Inapty (2024) dan Maulidya & Azmi (2024) yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat diduga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja. Terkait hal tersebut, Halim (2019) mengemukakan bahwa:

“Pencapaian akuntabilitas menuntut adanya sistem pengendalian, baik internal maupun eksternal, yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif di lingkungan pemerintahan diyakini akan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*, yang tercermin dari keberhasilan instansi pemerintah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2022 yaitu berada pada level 2 dari skala maksimal 5. Menurut Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2016, disebutkan “Maturitas level 2 adalah level berkembang, dimana organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma & Mildawati (2021) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah penerapan SPIP yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan faktor kunci dalam menunjang kinerja organisasi pemerintah. Hasil ini didukung oleh penelitian Tresnawati (2012), Octavia (2013), Juwita & Adzkhiyah (2017), Putra et al., (2018), Cholis & Fadli (2019), Mattoasi et al., (2021), Kharisma P et al., (2021), Martini et al., (2021), dan Anggini et al., (2021). Berbeda dengan Arifian Rachman, (2017) yang mengungkapkan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja koperasi serta Driyantama Putra et al., (2022), dan Rosayda et al., (2023) yang menjelaskan bahwa tidak ditemukan keterkaitan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang ada, kajian literatur yang relevan, serta temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan mengambil tema: “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Cimahi.”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kenis (1979) menjelaskan bahwa “*Budget goal clarity refers to the extent to which budget goals are stated specifically and clearly, and are understood by those who are responsible for meeting them.*” Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, serta dapat dipahami dengan baik oleh pihak terkait yang berwenang untuk mencapainya.

Maji et al., (2016) berdasarkan temuan penelitiannya menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu pencapaian target anggaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan kinerja manajerial. Sasaran yang jelas membantu pencapaian target dan meminimalkan ambiguitas yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

Lebih lanjut, Le & Nguyen (2020) menegaskan bahwa *budget goal clarity* dan *budget goal difficulty* berkontribusi memengaruhi peningkatan laba melalui peningkatan kinerja manajerial di perusahaan kecil dan menengah. Pandangan ini sejalan dengan teori A. Locke, (1968) mengenai *goal setting theory*, yang menyebutkan bahwa kejelasan dan tantangan dalam sasaran merupakan faktor utama dalam memotivasi kinerja.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, penerbitan PP Nomor 12 Tahun 2019 menekankan pentingnya pencapaian kinerja terukur dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah daerah lebih mudah mengevaluasi keberhasilan program pelayanan publik (Pemerintah Indonesia, 2019). Lebih lanjut, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa “Anggaran sektor publik berperan sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program yang didanai oleh sumber daya publik. Anggaran ini merupakan representasi dari hasil perumusan serta perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya.”

Penelitian empiris di sektor pemerintahan, seperti yang dilakukan Rahman & Yusuf, (2021) di Kota Makassar membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara nyata berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain seperti Nuryaman et al., (2020), Mardiana &

Setiyowati, (2021), dan Mulya & Fauzihardani, (2022) yang menjelaskan jika sasaran disusun secara jelas dan terukur, instansi pemerintah lebih mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agency theory atau Teori Keagenan sebagaimana dirumuskan oleh Jensen & Meckling (1976) memberikan penjelasan bagaimana mekanisme pengendalian internal dapat mengurangi biaya agensi dengan memonitor dan mengatur perilaku manajer (agen). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sejalan dengan itu, Kusuma, A. F. & Mildawati, (2021) Penelitian tersebut mengemukakan bahwa relasi antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban, di mana pemerintah berperan sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan dana publik yang berasal dari masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, teori keagenan memiliki peran penting dalam mendasari penerapan SPIP sebagai alat untuk memastikan bahwa pemerintah (*agent*) telah melakukan tindakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat (*principal*). Hubungan keagenan dalam konteks ini mencerminkan pemisahan kepemilikan dan pengawasan terhadap organisasi. Pemerintah daerah sebagai agen, bertanggung jawab untuk menerapkan SPIP dan memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan serta tata kelola keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Hubungan pengendalian internal dengan kinerja organisasi juga dijelaskan oleh COSO (2013), dimana penerapan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja organisasi, sebagaimana yang terdapat dalam pengantar kerangka kerja COSO yaitu "*Effective internal control helps entities achieve important objectives and sustain and improve performance.*" Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kharisma P et al., (2021) melalui studinya menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal bertujuan

untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi terlaksana sesuai dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai studi menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh positif SPIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Cholis & Fadli (2019) dan Mattoasi et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal memberikan kepastian bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan dengan standar yang ditetapkan demi kepentingan institusi dan pelayanan publik. Implementasi SPIP yang menyeluruh pada setiap tahap siklus kegiatan pemerintahan mendorong terciptanya akuntabilitas. Pengendalian internal yang dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara lebih efektif. (Hakim & Kusumah, 2025)

Sejalan dengan itu, penelitian Juwita & Adzkhiyah, (2017), Anggini et al., (2021) dan Sunarya et al., (2024) mengemukakan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja dapat terjadi jika sistem pengendalian intern, dirancang, dibangun, dan dapat bekerja dengan efektif hanya jika semua komponen di dalamnya terintegrasi dengan baik dan melakukan fungsinya dengan benar. Halim (2019) mengemukakan bahwa “Pencapaian akuntabilitas menuntut adanya sistem pengendalian, baik internal maupun eksternal, yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Sejumlah penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Tresnawati (2012), Octavia (2013), Putra et al., (2018), dan Martini et al., (2021) mengemukakan bahwa penerapan SPIP memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil dari telaah literatur mengenai variabel-variabel yang diteliti mengarahkan pada penyusunan model hipotesis penelitian yang ditampilkan dalam Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta melakukan pengujian empiris terhadap hubungan antar variabel yang dikaji. Penelitian deskriptif menurut Christina & Nuryaman (2015) adalah “Penelitian yang tujuannya untuk memperoleh

deskripsi atau gambaran tentang karakteristik tertentu (variabel tertentu) dari subjek yang sedang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian tersebut.”

Unit analisis adalah Dinas, Badan serta Kecamatan yang merupakan OPD pada Pemerintah Kota Cimahi. Populasi terdiri dari 30 OPD Pemerintah Kota Cimahi, seluruh populasi dijadikan sampel (teknik sampling jenuh). Adapun responden yaitu 1 orang Kasubag Program dan Keuangan, 1 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan 1 orang staf pengampu program/pengelola SAKIP pada setiap OPD.

Data penelitian diperoleh langsung dari sumber pertama (data primer). Christina & Nuryaman (2015) menjelaskan bahwa “Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data, yaitu subjek atau benda.” Data diperoleh melalui teknik: 1) Menyusun kuesioner dengan membuat pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, penyusunan kuesioner menggunakan skala *likert*, Observasi dan Wawancara. 2) Melalui telaah kepustakaan, telaah kepustakaan merupakan kegiatan menelaah berbagai literatur dan sumber informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2019)

Operasionalisasi variabel yang memuat definisi operasional, dimensi serta indikator termuat pada Tabel 2.

Teknik Analisis Data

Sugiyono, (2019) mengemukakan bahwa “Analisis deskriptif merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menyajikan data sebagaimana adanya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat inferensial atau generalisasi terhadap populasi yang lebih luas.” Guna menjamin keabsahan dan konsistensi data, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan.

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa “Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi, guna mendapatkan hasil yang terbaik.” Pengujian asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 0,05 dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, untuk memenuhi syarat kelayakan model regresi linier. Kemudian, setelah itu dilakukan uji kelayakan model.

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan beberapa pengujian, yaitu uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 90 kuesioner disebarkan kepada responden, dan dari jumlah tersebut, 84 kuesioner dikembalikan serta dapat diolah, dengan tingkat respons mencapai 93%.

Tabel 3 menyajikan hasil rekapitulasi sebanyak 44 responden (52,38%) merupakan laki-laki, sedangkan 40 responden lainnya (47,62%) adalah perempuan. Berdasarkan data usia, sebagaimana Tabel 4, sebagian besar responden memiliki usia diatas 40 tahun berjumlah 62 orang (73,81%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang terlibat dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja berada pada kelompok usia yang umumnya telah memiliki kematangan dan pengalaman kerja yang memadai. Berdasarkan data tingkat Pendidikan, sebagaimana Tabel 5, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 48 orang (57,14%), disusul oleh lulusan Magister (S2) sebanyak 29 orang (34,52%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar individu yang terlibat dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi.

Berdasarkan data masa kerja sebagaimana Tabel 6, sebagian besar responden sudah bekerja selama > 5 tahun ada 72 orang (85,71%) dapat disimpulkan rata-rata responden sudah mempunyai cukup pengalaman dalam bekerja. Berdasarkan data jabatan sebagaimana Tabel 7, responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Program/Keuangan OPD sebanyak 24 orang (28,57%) dari target responden seharusnya yaitu 30 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebanyak 30 orang (35,71%), dan Staf Pengampu Program/Pengelola SAKIP sebanyak 30 orang (35,71%).

Analisis Deskriptif

Berdasarkan perhitungan uji validitas, $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada $n = 84$ yaitu 0,180. Diketahui nilai indeks validitas berdasarkan perhitungan lebih besar dari 0,180, sehingga pernyataan terbukti valid.

Ghozali (2018) memberikan penjelasan bahwa “Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,70.” Berdasarkan hasil uji realibilitas, diperoleh hasil: Kejelasan Sasaran Anggaran (0,701), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(0,851), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (0,853), ketiganya telah melampaui ambang batas sebesar 0,70.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner kejelasan sasaran anggaran (X_1), rata-rata keseluruhan (*mean*) diperoleh nilai sebesar 4,12 (baik). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami dengan baik sasaran anggaran yang telah dirumuskan oleh organisasi. Dari ketujuh pernyataan yang diukur dalam variabel ini, pernyataan pada indikator tujuan memiliki nilai tertinggi, yaitu 4,40 dengan kategori sangat baik. Sedangkan, pernyataan pada indikator kinerja memiliki nilai terendah yaitu 3,76 dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner SPIP (X_2), rata-rata keseluruhan (*mean*) diperoleh hasil penilaian 4,10 (baik). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam organisasi telah dijalankan secara memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian yang ditetapkan. Dari total 25 pernyataan pada kuesioner, pernyataan pada indikator “Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya”, memiliki nilai tertinggi, yaitu 4,27 dengan kategori sangat baik. Sedangkan, pernyataan pada indikator “Struktur organisasi OPD sudah sesuai dengan kebutuhan”, memiliki nilai terendah yaitu 3,79 dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), rata-rata keseluruhan (*mean*) diperoleh hasil nilai 4,09 (baik). Secara umum, hasil penelitian mencerminkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah terlaksana secara memadai. Berdasarkan 22 butir pernyataan yang disusun untuk mengukur variabel ini, pernyataan pada indikator “Terdapat dokumen perencanaan kinerja memiliki nilai tertinggi”, yaitu 4,30 dengan kategori sangat baik. Sedangkan, pernyataan pada indikator “Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”, memiliki nilai terendah yaitu 3,67 dengan kategori baik.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 8 menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,190 berdasarkan hasil pengujian. Hasil tersebut melebihi batas signifikansi sebesar 0,05. Residual yang berdistribusi normal menunjukkan terpenuhinya asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser yang disajikan dalam Tabel 9 memperlihatkan nilai signifikansi variabel-variabel, yaitu 0,327 pada Kejelasan Sasaran Anggaran serta 0,627 pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kedua nilai ini berada di atas ambang batas 0,05, sehingga tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model.

3) Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 10, nilai Tolerance yang lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Model Regresi Linier Berganda

Hasil uji kelayakan model (uji F) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 11 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan secara keseluruhan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Berdasarkan Tabel 12, berikut persamaan penelitian yang diperoleh:

$$Y = 27,089 + 0,316(X_1) + 0,526(X_2) + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan tersebut adalah:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 27,089.
2. Koefisien regresi untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) tercatat sebesar 0,316 dengan tanda positif.
3. Koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) bernilai positif sebesar 0,526.

Tanda positif tersebut mencerminkan kecenderungan hubungan yang searah antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Merujuk pada Tabel 13, nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar 0,548 atau 54,8%. Artinya, sebesar 54,8% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model regresi ini, sementara 45,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Uji Hipotesis

Pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebesar 81, nilai t-tabel satu arah ditetapkan sebesar 1,664. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja karena nilai signifikansi $0,113 > 0,05$ dan t-hitung $1,604 < t\text{-tabel}$. Sebaliknya, variabel Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan t-hitung 6,256 > t-tabel.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran belum menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa “Anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dari dana publik. Anggaran tidak hanya menjadi tolok ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, tetapi juga berperan sebagai pedoman kerja dalam perencanaan kegiatan.” Selaras dengan itu, Kenis (1979) dalam definisinya menegaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merujuk pada suatu keadaan di mana tujuan anggaran dirumuskan secara spesifik, tidak ambigu, serta mudah dimengerti oleh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaiannya. Definisi ini menyoroti pentingnya komunikasi dan pemahaman bersama terutama bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, agar sasaran anggaran dalam proses penganggaran dilaksanakan secara efektif.

A. Locke (1968) sebagaimana dikutip oleh Kenis (1979), menambahkan jika penetapan tujuan yang spesifik akan memberikan hasil yang lebih produktif dibandingkan dengan hanya memberikan arahan umum tanpa tujuan yang jelas. Tujuan yang spesifik mampu mendorong pegawai untuk berupaya maksimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga memacu kinerja yang lebih baik

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuryaman et al., (2020), Le & Nguyen, (2020), Maji et al., (2016), Rahman & Yusuf, (2021), Mardiana & Setiyowati, (2021) dan Mulya & Fauzihardani, (2022) yang menunjukkan bahwa semakin jelas dan spesifik tujuan anggaran yang ditetapkan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap terciptanya akuntabilitas kinerja.

Hasil ini dapat disebabkan karena meskipun secara normatif sasaran anggaran telah tercantum dalam dokumen penganggaran, sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, namun dalam prakteknya menunjukkan bahwa keterpaduan ini belum sepenuhnya terwujud. Dalam penyusunan anggaran, fokus pembahasan seringkali masih tertuju pada aspek nominal atau *input*, tanpa membahas secara mendalam aspek *output* dan *outcome* dari kegiatan yang dibiayai. Padahal, salah satu prinsip dasar penganggaran berbasis kinerja adalah keterkaitan yang kuat antara *input* (dana), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil).

Belum jelasnya sasaran anggaran dalam dokumen penganggaran, dapat disebabkan karena belum terpadunya proses penyusunan sasaran pada tahap perencanaan dan tahap penganggaran, seperti ditemukan masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup menggambarkan sasaran, masih terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan sulit diukur serta masih terdapat target kinerja yang belum memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sasaran anggaran dalam dokumen penganggaran seringkali hanya bersifat administratif dan tidak dibarengi dengan pemahaman atau partisipasi dari pengelola anggaran, mengenai keterkaitan antara pelaksanaan penganggaran dengan capaian kinerja organisasi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di suatu instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil tersebut sesuai dengan kerangka kerja COSO (2013), dimana pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja organisasi, sebagaimana yang terdapat dalam pengantar kerangka kerja COSO yaitu “*Effective internal control helps entities achieve important objectives and sustain and improve performance.*” Berdasarkan kerangka kerja COSO (2013), Pengendalian internal yang efektif mencakup lima komponen

utama yang saling terintegrasi dan harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh proses serta unit dalam organisasi.

Komponen-komponen tersebut meliputi:

“1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen puncak terhadap pentingnya pengendalian, 2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, 3) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), berupa kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen terlaksana, 4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), yang menjamin bahwa informasi yang relevan dikumpulkan dan dikomunikasikan tepat waktu, dan 5) Pemantauan (*Monitoring Activities*), yang mencakup evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian internal dan tindak lanjut atas temuan yang ada.”

Penerapan SPIP memiliki dasar hukum yang kuat yaitu melalui PP No. 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa “Setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diwajibkan untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern.” Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan SPIP serta membentuk Satuan Tugas pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Halim (2019) mengemukakan bahwa “Pencapaian akuntabilitas menuntut adanya sistem pengendalian, baik internal maupun eksternal, yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.” Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan pemerintahan diyakini dapat memperkuat implementasi prinsip *good governance*, yang tercermin melalui kemampuan instansi pemerintah dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati (2012), Octavia (2013), Juwita & Adzkhayah (2017), Putra et al., (2018), Cholis & Fadli (2019), Kusuma & Mildawati (2021), Mattoasi et al., (2021), Kharisma P et al., (2021), Martini et al., (2021), dan Anggini et al., (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan SPIP berkontribusi secara positif terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja dalam lingkungan organisasi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran belum menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan, bahwa kejelasan dalam perumusan sasaran anggaran belum dapat diidentifikasi sebagai faktor utama yang secara langsung memengaruhi akuntabilitas kinerja. Di sisi lain, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan SPIP dalam suatu organisasi pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengendalian intern sebagai instrumen utama dalam mendorong kinerja organisasi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja, seperti partisipasi penyusunan anggaran, komitmen pimpinan ataupun budaya organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas wilayah cakupan, misalnya mencakup beberapa kabupaten/kota atau provinsi, agar hasilnya lebih representatif dan dapat dibandingkan secara regional.

DAFTAR PUSTAKA

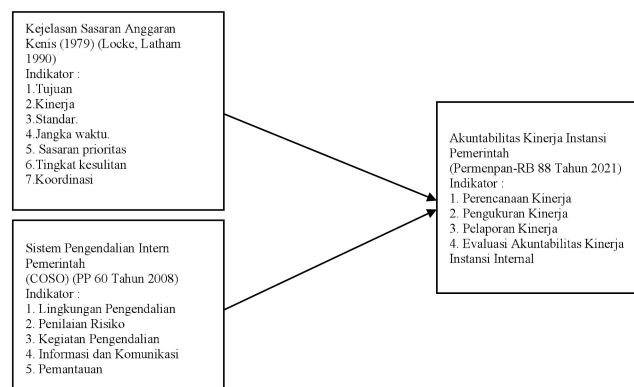
- A. Locke, Latham, E. (1990). Agie Ahadian Rahmansyah *A Theory Of Goal Setting & Task Performance*. (A. Pietropinto, Ed.). New Jersey: Prentice Halls.
- A. Locke, E. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(M), 157–189.
- Anggini, S. W., Rosidi, R., & Andayani, W. (2021). The Moderating Role Of Change Management And Leadership Turnover: A Study Of Performance Accountability In Local Goverment. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 103–117. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.15440>
- Arifian Rachman, A. (2017). Internal Control, Good Cooperative Governance, and Performance. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(11). Diambil dari www.ijstr.org
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2016).
- Cholis, N., & Fadli, F. (2019). Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu (Studi Pada OPD Kota

- Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 145–154. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.145-154>
- Christina, V., & Nuryaman. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Bisnis : Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Diambil dari <https://www.coso.org/Pages/ic.aspx>
- Diskominfo Provinsi Lampung. (2022). Mendagri: Serapan APBD minimal 90 persen. Diambil dari <https://www.lampungprov.go.id/detail-post/mendagri-serapan-apbd-minimal-90-persen>
- Driyantama Putra, D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 34–44.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, F., & Kusumah, R. W. R. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti), Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pusat Statistik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2050–2070. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5360>
- Halim, A. (2019). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Keen). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(2), 31–36.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, And Ownership Strucuture. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Juwita, R., & Adzkhayah, M. (2017). Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Manajerial. *Trikonomika : Jurnal Ekonomi*, 16(2), 68–74.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021>
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Perfomance. *American Accounting Association, LIV, No. 4*(October 1979).
- Kharisma P, I., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(2), 126–135. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.14278>
- Kusuma, A. F., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Le, T. N., & Nguyen, D. D. (2020). An Impact Of Budgetary Goal Characteristics On Performance: The Case Of Vietnamese SMEs. *Journal of Asian Finance*,

- Economics and Business*, 7(9), 363–370.
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.363>
- Maji, S. G., Panda, N. M., & Hussein, S. S. (2016). The Association Between Budget Goal Clarity And Managerial Performance In Iraqi Oil Refinery: The Role Of Budget Goal Difficulty And Budget Participation. *Middle East J. of Management*, 3(4), 343. <https://doi.org/10.1504/mejm.2016.10001933>
- Mardiana, M., & Setiyowati, S. W. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran Dan SPIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Dimoderasi Partisipasi Penyusun. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 116–126.
<https://doi.org/10.18860/em.v12i2.11813>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. (Mardiasmo, Ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martini, R., Ramadhan, M. A., & Hartati, S. (2021). Aspects Affecting the Accountability Performance of Government Agencies Banyuasin District. *Proceedings of the 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20)*, 1(8), 167–171. <https://doi.org/10.2991/ahsseh.k.210122.029>
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Maulidya, P. D., & Azmi, I. N. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa, Vol 13, No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/akunesa.v13n1.p73-86>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212.
<https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Nuryaman, Septiansyah, R. C., & Arnan, S. G. (2020). The Effect Of Budget Goals Clarity and Organizational Commitment On Managerial Performance (Study On Cimahi City Government, West Java Province, Indonesia). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 3578–3586.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200678>
- Octavia, E. (2013). The Effects Of Implementation On Internal Audit And Good Corporate Governance In Corporate Performance. *Journal of Global Business & Economics*, 6(1), 77–88.
- Padmadiani, R., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2023). The Influence of Clarity of Budget Targets and Internal Control on the Performance Accountability of Government Institutions (Study in Regional Apparatus Organizations in Gorontalo District). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 240–251.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006).
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). Determinan Akuntabilitas Kinerja

- Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(2), 271–290. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942>
- Putri, E. O., & Inapty, B. A. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran, Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kepolisian Di NTB. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 123–141. <https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.449>
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Riyani, A. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 477–486.
- Rosayda, A., Bawono, I. R., & Rusmana, O. (2023). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Faktor - Faktor Yang Memengaruhinya. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 732–747.
- Silviana, S., Sitepu, H. V, Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., & ... (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. (E. Efitra & W. Gustiani, Ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarya, A., Mauludina, I., & Silviana. (2024). The Influence of Implementing Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, and Apparatus Competence on the Quality of West Java Provincial Government Financial Reports. *International Journal of Social Science and Business*, 8(1), 198–207.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Tresnawati, R. (2012). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Widyatama* (hal. 139–151). Bandung. Diambil dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2424>

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Tabel 1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi

No	Keterangan	Predikat	Nilai
1	Tahun 2017	B	60,68
2	Tahun 2018	B	63,99
3	Tahun 2019	B	66,00
4	Tahun 2020	B	65,07
5	Tahun 2021	B	65,88
6	Tahun 2022	B	65,14
7	Tahun 2023	B	65,90
8	Tahun 2024	B	66,22

(Data: Kemenpan RB)

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Kenis, 1979)		1) Tujuan	Interval	1
				2) Kinerja	Interval	2
				3) Standar	Interval	3
				4) Jangka waktu	Interval	4
				5) Sasaran prioritas	Interval	5
				6) Tingkat kesulitan	Interval	6
				7) Koordinasi	Interval	7
				(Locke, Latham 1990)		

No	Varabel	Kons ep	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan (COSO 2013)	1) Lingkungan Pengendalian	a) Penegakan integritas dan nilai etika	Interval	8
				b) Komitmen terhadap kompetensi	Interval	9
				c) Kepemimpinan yang kondusif	Interval	10
				d) Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Interval	11
				e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Interval	12
				f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Interval	13
				g) Perwujudan peran APUP yang efektif	Interval	14
				h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait	Interval	15
			2) Penilaian Risiko	a) Identifikasi risiko	Interval	16
				b) Analisis risiko	Interval	17
				a) Reviu kinerja	Interval	18
				b) Pembinaan SDM	Interval	19
				c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Interval	20
				d) Pengendalian fisik atas aset	Interval	21
				e) Penetapan dan reviu indikator	Interval	22
				f) Pemisahan fungsi	Interval	23
			3) Kegiatan Pengendalian	g) Otorisasi transaksi dan kejadian penting	Interval	24
				h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	Interval	25
				i) Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	Interval	26
				j) Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya	Interval	27
k) Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	Interval	28				
4) Informasi dan Komunikasi	a) Informasi yang relevan	Interval		29		
	b) Komunikasi yang efektif	Interval		30		
5) Pemantauan	a) Pemantauan berkelanjutan	Interval		31		
	b) Tindakan lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (PP 60 Tahun 2008)	Interval	32			

No	Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN 2019)	1) Perencanaan Kinerja	a) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	Interval	33
				b) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	Interval	34, 35, 36
				c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Interval	37
			2) Pengukuran Kinerja	a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Interval	38
				b) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Interval	39, 40, 41
				c) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Interval	42, 43
			3) Pelaporan Kinerja	a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Interval	44, 45, 46
				b) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar	Interval	47, 48
				c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Interval	49, 50
			4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	Interval	51
				b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	Interval	52
				c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja (Pemeripan RB 88 Tahun 2021)	Interval	53, 54

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 3 Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	40	47,62%
2	Perempuan	44	52,38%
Total		84	100,00%

Sumber: Olah Data, 2025

Tabel 4 Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	25 – 30 Tahun	4	4,76%
2	31 – 35 Tahun	4	4,76%
3	36 – 40 Tahun	14	16,67%
4	>40 Tahun	62	73,81%
Total		84	100,00%

Sumber: Olah Data, 2025

Tabel 5 Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	- SMA	0	0,00%
2	- Diploma	7	8,33%
3	- S 1	48	57,14%
4	- S 2	29	34,52%
Total		84	100,00%

Sumber: Olah Data, 2025

Tabel 6 Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Th	3	3,57%
2	1 – 5 Th	9	10,71%
3	> 5 Th	72	85,71%
	Total	84	100,00%

Sumber: Olah Data, 2025

Tabel 7 Jabatan

No.	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Kasubag Program/Keuangan OPD	24	28,57%
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	30	35,71%
3	Staf Pengampu Program/Pengelola SAKIP	30	35,71%
	Total	84	100,00%

Sumber: Olah Data, 2025

Tabel 8 Hasil Pengujian Normalitas dengan Uji Kolmogorov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.74948879
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.072
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.190 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Tabel 9 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.606	4.130		-.873	.385
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.127	.128	.146	.987	.327
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.027	.055	.072	.487	.627

a. Dependent Variable: AbsUT

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Tabel 10 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.089	6.335		4.276	.000		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.316	.197	.161	1.604	.113	.539	1.857
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.526	.084	.629	6.256	.000	.539	1.857

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Tabel 11 Hasil Hasil Uji F Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1480.702	2	740.351	51.393	.000 ^b
	Residual	1166.869	81	14.406		
	Total	2647.571	83			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Tabel 12 Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.089	6.335		4.276	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.316	.197	.161	1.604	.113
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.526	.084	.629	6.256	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.548	3.795

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber: Olah Data SPSS, 2025